

2024

LAPORAN

EVALUASI RENJA

TRIWULAN II



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa, karena berkat rahmat hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan II Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2024. Laporan ini Disusun dalam rangka memenuhi amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II disusun sebagai instrumen untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi kegiatan yang selanjutnya digunakan sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan sasarannya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Demikianlah disampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Bandar Lampung, Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



Drs. ASWARQDL, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700611 199003 1 003

Daftar Isi

I.	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-4
1.3	Tujuan dan Sasaran SKPD	I-5
1.4	Tabel PPKS	I-6
1.5	Matriks keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung	I-7
II.	PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA DAN RENJA.....	II-8
2.1	Gambaran Umum	II-8
2.2	Program dan Kegiatan Renstra Periode (2019-2024)	II-10
2.3	Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	II-17
2.4	Kesesuaian Perbandingan Jumlah Program Renstra dan Renja	II-34
2.5	Kesesuaian Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra dan Renja.....	II-35
III.	CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PROV.LAMPUNG TAHUN 2024	III-36
3.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-36
3.2	Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung	III-37
IV.	HAMBATAN DAN KENDALA	IV-38
4.1	Hambatan dan Kendala.....	V-38
4.2	Upaya Pemecahan Masalah	V-39
V.	PENUTUP	V-40
5.1	Kesimpulan.....	V-40
5.2	Rekomendasi	V-41
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah., menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPD adalah pelaksanaan Evaluasi Renja. Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Disisi lain keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik itu lembaga sosial maupun orang-orang (individu) yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penanganan PPKS masih perlu dioptimalkan. Keterbatasan yang ada pada pemerintah diharapkan didukung peran PSKS dalam membantu program Pemerintah Daerah menurunkan jumlah PPKS yang ada.

Karena itu, diharapkan lembaga-lembaga sosial harus lebih diprioritaskan berdasarkan pada fungsi yang diemban. PSKS ada 12 jenis dengan pengertian sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial (PEKSOS)

Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Karang Taruna

Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Suatu lembaga/organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk

sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

7. Penyuluh Sosial Masyarakat

Tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

9. Dunia Usaha

Organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan pola yang telah ditentukan, sebagai sasarannya adalah mereka yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan sosial psikologis dan fisik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial psikologis, kecacatan dan ketunaannya.

Pelayanan sistem panti dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat seperti melalui UPTD : UPTD Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD), UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan, UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werdha, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan

Anak Harapan Bangsa Kalianda, UPTD Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Insan Berguna dan panti-panti swasta yang tersebar diseluruh Kabupaten / Kota. Sedangkan penanganan sistem luar panti pelaksanaan pelayanannya dilakukan dalam keluarga atau masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dibina, dilatih dan dibimbing ditengah-tengah masyarakat, semua bentuk pelayanan tersebut dimaksudkan untuk membimbing dan membina kelayan agar memiliki kemandirian dan keberfungsian sosial. Perkembangan penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlebih ditengah krisis multi dimensi ini semakin luas dan komplek, sementara pelayanan sosial baik melalui panti, luar panti, maupun sistem alternatif lainnya belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan jangkauan pelayanan belum mencapai target yang diharapkan.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN SKPD

A. Tujuan

Secara umum tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat, dunia usaha dengan rincian :

1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, fakir miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta kelompok marjinal lainnya;
2. Meningkatnya akses pelayanan sosial dasar dan kegiatan ekonomi produktif untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk masalah kesejahteraan sosial lainnya;
3. Terjaminnya penghargaan bagi (keluarga) pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
4. Meningkatnya peran dunia usaha dan lembaga sosial dalam melakukan pemberdayaan sosial.

B. Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi ketiga : Meningkatkan kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.

Pada bidang sosial dengan sasaran :

1. Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas

Tabel 1.4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Menurut
Kabupaten /Kota

NO	JENIS PPKS	2020	2021	2022	2023
1	Anak Terlantar	8.536	8.536	68.409	21.313
2	Penyandang Disabilitas	38.228	38.228	14.434	14.335
3	Lanjut Usia	396.155	396.155	76.962	53.714
4	Tuna Sosial	505	505	347	408
	Jumlah Jiwa	443.424	443.424	160.152	89.770

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Kab/Kota Se- Provinsi Lampung, 2023

Secara umum penanganan PPKS di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PPKS yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kedepan perlu ditingkatkan lagi penanganannya sehingga PPKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya, mandiri dan meningkat kesejahteraannya.

Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2023	2023	2024
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi yang tertangani	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	0,25%	1,70%	1,72%	1,74%	1,76%
2	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Penguatan dan Pemahaman Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

BAB II

PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DENGAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

2.1 Gambaran Umum

Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung telah diarahkan pada partisipasi masyarakat seluas-luasnya (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT) dengan prinsip tidak menciptakan ketidaktergantungan bagi Penyandang Masalah (HELP PEOPLE TO HELP THEMSELVES) namun hasilnya masih belum maksimal, karena berbagai hal antara lain: karakteristik permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks, fluktuatif, mobilitas yang tinggi dan sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkan terlebih dalam keadaan krisis usaha kesejahteraan sosial sangat sulit dilaksanakan oleh masyarakat baik melalui keluarga atau individu.

Oleh karena itu penanganan masalah kesejahteraan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan masih tetap harus dibawah pembinaan instansi pemerintah.

Isu strategis dibidang Kesejahteraan Sosial antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai wilayah pedesaan terutama di wilayah terisolasi, daerah kumuh diperkotaan dan daerah rawan bencana serta isu kurangnya kepedulian terhadap upaya perbaikan kehidupan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial antara lain:

1. Fakir Miskin

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

2. Penyandang Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau

gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

3. Orang Terlantar

Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan pemuda.

4. Tuna Sosial

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang.

5. Komunitas Adat Terpencil

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan di Provinsi Lampung yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 765 desa di lima Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang .

6. Bencana Alam dan Sosial

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat, baik skala nasional maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup

tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Isu ini perlu mendapat penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan disemua jenjang pemerintahan dan aparatur pelayanan masyarakat.

2.2 Program dan Kegiatan Renstra Periode (2019-2024)

Pada Renstra Dinas Sosial Provinsi periode (2019-2024) terdapat 7 (tujuh) program, 20 kegiatan dan 124 Sub Kegiatan Renstra dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pada program ini terdapat 8 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 3. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 4. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 6. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - 2. Pengamanan barang milik daerah SKPD
 - 3. Koordinasi dan penilaian barang milik perangkat daerah SKPD
 - 4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
 - 5. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
 - 6. Penatausahaan barang milik perangkat daerah
 - 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Daerah
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - 3. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
 - 4. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 6. Penyediaan bahan/material
 - 7. Fasilitasi kunjungan tamu
 - 8. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pengadaan Mebel
 - 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan sinas operasional atau lapangan
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 3. Pemeliharaan mebel
 4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 5. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 6. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya
 7. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 1. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang
- b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 1. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi
 2. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan provinsi
 3. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga

4. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasih di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal
 1. Fasilitas pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasih di daerah provinsi untuk dipulangkan kedaerah kabupaten/kota asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
 1. Penyediaan permakanan
 2. Penyediaan sandang
 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 4. Penyediaan alat bantu
 5. Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
 6. Pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial
 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan
 9. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 12. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar

- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - 1. Pengasuhan
 - 2. Penyediaan makanan
 - 3. Penyediaan sandang
 - 4. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - 5. Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
 - 6. Pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial
 - 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - 8. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak
 - 9. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
 - 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - 12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
 - 13. Koordinasi sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
 - 1. Penyediaan permakanan
 - 2. Penyediaan sandang
 - 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - 4. Penyediaan alat bantu
 - 5. Pemberian perbekalan Kesehatan di dalam panti sosial
 - 6. Pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial
 - 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari hari
 - 8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan
 - 9. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
 - 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - 12. Pemulasaran
 - 13. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti

- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
 - 1. Penyediaan permakanan
 - 2. Penyediaan sandang
 - 3. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses
 - 4. Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
 - 5. Pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial
 - 6. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - 7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 - 8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak
 - 9. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
 - 10. Pemulangan ke daerah asal
 - 11. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti
- e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti
 - 1. Penyediaan permakanan
 - 2. Penyediaan sandang
 - 3. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses
 - 4. Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
 - 5. Pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial
 - 6. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - 7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 - 8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak
 - 9. Akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
 - 10. Pemulangan ke daerah asal
 - 11. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 1. Pengangkatan anak antar WNI
 2. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 1. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
 2. Pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten/kota
 3. Fasilitasi bantuan sosial pengembangan ekonomi masyarakat

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 1. Penyediaan permakanan
 2. Penyediaan sandang
 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
 5. Pelayanan dukungan psikososial

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 1. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional provinsi
 2. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi
 3. Pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi

2.3 Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024

Pada tahun ini terdapat terdapat 7 (tujuh) program, 18 kegiatan dan 97 Sub Kegiatan Renja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.003.652.606,75,- dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pada program ini terdapat 7 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan total anggaran program Rp. 22.949.477.671,75,- yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan total anggaran kegiatan Rp. 150.000.000,- yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 28.185.150,- dengan target indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD sebanyak 5 dokumen.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 70.649.850,- dengan target indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 11 laporan.

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 51.165.000,- dengan target indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 7 laporan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan total anggaran kegiatan Rp. 19.143.968.024,60,- yaitu:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 18.332.968.024,50,- dengan target indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 157 orang/bulan.

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 775.000.000,- dengan target indikator dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 10.300.000,- dengan target indikator laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 5.100.000,- dengan target indikator jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan laporan tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 25.450.000,- dengan target indikator jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD sebanyak 12 laporan.
 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 5.150.000,- dengan target indikator jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan total anggaran kegiatan Rp. 20.000.000,- yaitu:
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Perangkat Milik Daerah SKPD
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 5.000.000,- dengan target indikator jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD sebanyak 1 dokumen.

2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 5.000.000,- dengan target indikator jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan.
 3. Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan target indikator jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan.
- d. Administrasi Kepegawaian Daerah, dengan total anggaran kegiatan Rp. 58.000.000,- yaitu:
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 28.000.000,- dengan target indikator jumlah dokumen dalam penilaian kinerja pegawai ASN sebanyak 12 dokumen.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan target indikator jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sebanyak 30 orang.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan total anggaran kegiatan Rp. 1.144.450.482,- yaitu:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan target indikator jumlah komponen instalasi listrik sebanyak 1 Paket.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 126.382.000,- dengan target indikator jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket.
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 28.669.000,- dengan target indikator jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 1 paket.

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan target indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 1 paket.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 91.025.482,- dengan target indikator jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket.

6. Penyediaan Bahan/Material

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 75.000.000,- dengan target indikator jumlah paket bahan/material yang disediakan sebanyak 1 paket.

7. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 45.000.000,- dengan target indikator jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu sebanyak 12 laporan.

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 718.374.000,- dengan target indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan total anggaran kegiatan Rp. 1.804.684.631,- yaitu:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 5.112.000,- dengan target indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 440.192.731,- dengan target indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan.
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 50.000.000,- dengan target indikator jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan.
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 1.309.379.900,- dengan target indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan total anggaran kegiatan Rp. 628.374.534,15,- yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 507.710.000,- dengan target indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 14 unit.
 2. Pemeliharaan Mebel
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 19.500.000,- dengan target indikator jumlah mebel yang dipelihara sebanyak 50 unit.
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 70.000.000,- dengan target indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 8 unit.
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 31.164.534,15,- dengan target indikator jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 5 unit.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran program Rp. 351.896.850 yaitu:

- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan total anggaran kegiatan Rp. 40.000.000,- yaitu:
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Dan Barang
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 40.000.000,- dengan target indikator jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sebanyak 8 dokumen.
- b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, dengan total anggaran kegiatan Rp. 311.896.850,- yaitu:
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 71.391.450,- dengan target indikator jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi sebanyak 60 orang.
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 70.639.400,- dengan target indikator jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya sebanyak 229 orang.
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 69.866.000,- dengan target indikator jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi sebanyak 40 keluarga.

4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 100.000.000,- dengan target indikator jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi sebanyak 30 lembaga.

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran program Rp. 249.999.500, yaitu:

a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasih di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal, dengan total anggaran kegiatan Rp. 249.999.500,- yaitu:

1. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasih Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 249.999.500,- dengan target indikator jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota sebanyak 15 orang.

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan total anggaran program Rp. 7.837.448.908,- yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti, dengan total anggaran kegiatan Rp. 1.104.562.599,- yaitu:

1. Penyediaan Permakanan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 573.637.500,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

2. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 89.906.700,- dengan target indikator jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

3. Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

4. Penyediaan Alat Bantu

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 66.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 53.109.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

6. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 236.319.399,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 50.000.000,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 1.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak bagi anak terlantar kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.

9. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 14.850.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 4.740.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 5.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi sebanyak 50 orang.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti, dengan total anggaran kegiatan Rp. 3.640.016.644,- yaitu:

1. Pengasuhan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 356.238.050,- dengan target indikator jumlah anak yang mendapatkan layanan pengasuhan kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

2. Penyediaan Makanan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 1.590.405.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi disediakan sebanyak 165 orang.

3. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 282.418.700,- dengan target indikator jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

4. Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 120.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 50.917.103,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan dalam di dalam panti kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

6. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 372.027.829,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 180.565.220,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 7.500.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak kewenangan provinsi sebanyak 100 orang.

9. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 613.851.800,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 53.932.800,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 12.160.142,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi sebanyak 165 orang.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, dengan total anggaran kegiatan Rp. 1.357.732.279,- yaitu:

1. Penyediaan Permakanan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 975.602.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.

2. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 65.612.279,- dengan target indikator jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersediadalam 1 tahun kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.

3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.

4. Penyediaan Alat Bantu

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 14.250.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.

5. Pemberian Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 35.153.700,- dengan target indikator orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.

6. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 169.934.300,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.
7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-Hari
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 12.960.000,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan aktivitas sehari-hari kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.
8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 2.500.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan bagi lanjut usia terlantar kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
9. Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 7.100.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.
10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 22.084.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.
11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 22.084.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi sebanyak 85 orang.
12. Pemulasaran
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 20.452.000,- dengan target indikator jumlah pemulasaran kewenangan provinsi sebanyak 10 orang.

- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti, dengan total anggaran kegiatan Rp. 537.572.726,- yaitu:
1. Penyediaan permakanan
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 273.750.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 2. Penyediaan sandang
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 19.302.500,- dengan target indikator jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 3. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 10.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terakses asrama/wisma layak huni kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 6.304.429,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 5. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 51.570.000,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 122.911.597,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.

7. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 24.611.200,- dengan target indikator jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 2.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas gelandangan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 9. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 7.225.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 10. Pemulangan ke Daerah Asal
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 9.790.000,- dengan target indikator jumlah gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal kewenangan provinsi sebanyak 25 orang.
 11. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 10.108.000,- dengan target indikator jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti sebanyak 1 dokumen.
- e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti, dengan total anggaran kegiatan Rp. 1.197.564.660,- yaitu:
1. Penyediaan Permakanan
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 471.626.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan

kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi sebanyak 80 orang.

2. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 1.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi sebanyak 80 orang.

3. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 150.000.000,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi sebanyak 80 orang.

4. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 510.274.200,- dengan target indikator jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi sebanyak 80 orang.

5. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 61.680.800,- dengan target indikator jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan provinsi sebanyak 80 orang.

6. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 2.983.660,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan provinsi sebanyak 80 orang.

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran program Rp. 1.053.153.000,- yaitu:

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, dengan total anggaran kegiatan Rp. 1.053.153.000,- yaitu:

1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 150.000.000,- dengan target indikator jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi sebanyak 700 keluarga.

2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 103.153.000,- dengan target indikator jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin lintas kabupaten/kota sebanyak 700 keluarga.

3. Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 800.000.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan provinsi sebanyak 700 orang.

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran program Rp. 1.267.505.677, yaitu:

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi, dengan total anggaran kegiatan Rp. 1.267.505.677,- yaitu:

1. Penyediaan Permakanan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 23.140.320,- dengan target indikator jumlah pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi sebanyak 500 orang.

2. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 19.012.000,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan provinsi sebanyak 500 orang.

3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 534.640.000,- dengan target indikator jumlah tempat pengungsian kewenangan provinsi sebanyak 2 unit.

4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 506.545.800,- dengan target indikator jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi sebanyak 500 orang.

5. Pelayanan Dukungan Psikososial

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 184.167.557,- dengan target indikator jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan provinsi sebanyak 500 orang.

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran program Rp. 294.171.000, yaitu:

a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi, dengan total anggaran kegiatan Rp. 294.171.000,- yaitu:

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 44.171.000,- dengan target indikator jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional provinsi sebanyak 2 dokumen.

2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

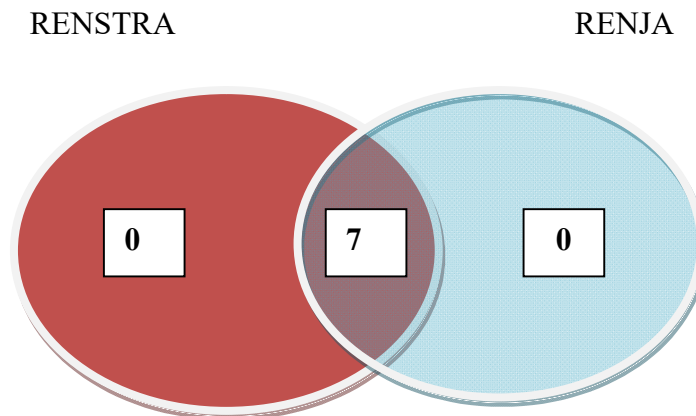
Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran Rp. 250.000.000,- dengan target indikator jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional provinsi sebanyak 2 makam.

2.4 Kesesuaian Perbandingan Jumlah Program Renja dan Renstra

Jika dilihat kesesuaian program antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024, maka jumlah program yang ada di Renstra 8 dan Renja adalah sebanyak 7 program.

Jumlah program yang tidak konsisten dikarenakan adanya perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, artinya semua program dan kegiatan yang ada di Renstra berubah berdasarkan peraturan yang baru dan terdapat penambahan sub kegiatan yang tidak tertuang dalam Renstra tahun sebelumnya.

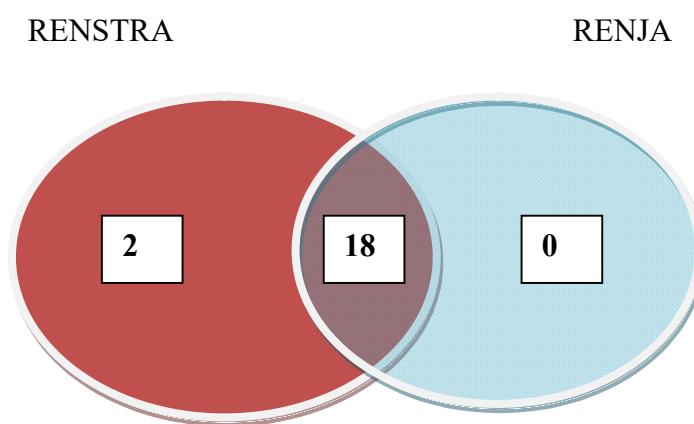
Gambar
Kesesuaian Program dalam Renstra dan Renja
Tahun 2024



2.5 Kesesuaian Perbandingan Jumlah Kegiatan Renja dan Renstra

Jika dilihat kesesuaian kegiatan antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024, maka jumlah kegiatan yang ada di Renstra sebanyak 20 dan Renja adalah sebanyak 18 kegiatan.

Gambar
Kesesuaian Kegiatan dalam Renstra dan Renja
Tahun 2024



BAB III

CAPAIAN KINERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2024

3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	2024	
						Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS kewenangan Provinsi yang tertangani	persen	1,74 %	4,2 %	1,76 %	
2	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Penguatan dan Pemahaman Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	persen	20 %	20 %	20 %	

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator Jumlah penanganan penduduk miskin target yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah 1,74 % dan realisasinya 4,2 % atau kurang lebih 241% melebihi target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai masuk kriteria sangat baik, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah sangat fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan masyarakat yang terdampak inflasi, sehingga terjadi penurunan kemiskinan yang sangat signifikan pada tahun ini. Secara Gradual angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan terus-menerus, meskipun pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan kembali sebagai akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional dan dunia. Juga akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat tingkat angka kemiskinan yang semakin meningkat sehingga banyaknya masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan realisasi indikator sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung pada

Tahun 2023 tercapai sesuai target dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Sosial Provinsi Lampung telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 34.003.652.606,75,- dan serapan keuangan pada Triwulan II sebesar Rp. 13.802.233.048,- atau 40,59% Adapun Realisasi Capaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Output kegiatan tahun 2023 dari masing-masing program terlampir.

3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung

Pencapaian Kinerja dari hasil Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 Triwulan II dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata – Rata tingkat capaian kinerja pada keseluruhan program Tahun 2024 Triwulan II sebesar **26,86%**
2. Rata – Rata tingkat capaian keuangan Tahun 2024 Triwulan II sebesar **40,59%.**

Terlampir Laporan Evaluasi Renja sesuai format di aplikasi Simonev dan tabel kesesuaian antara Renja terhadap APBD Tahun 2024

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

4.1 Hambatan dan Kendala

Dari hasil pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Lampung. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah :

1. Keterbatasan jumlah aparatur/personil pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, khususnya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial/rehabilitasi sosial.
2. Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator dan fasilitator belum secara optimal dilakukan.
3. Belum optimalnya kerjasama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung.

Disamping itu terdapat juga beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024, antara lain :

1. Perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota dalam penanganan (PPKS) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Belum optimalnya petugas pendamping dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan sosial.
3. Akurasi data yang masih tidak update sebagai bahan penyusunan program, karena berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial bahwa wewenang pendataan adalah pada Kabupaten/Kota.

4.1 Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Lampung melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Provinsi Lampung mengupayakan adanya pengajuan penambahan formasi ASN kepada Badan Kepegawaian Daerah dan mengikutsertakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk selalu meningkatkan kapasitas baik itu bimtek ataupun pelatihan profesional.
2. Dalam rangka pemberdayaan Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator dan fasilitator belum adalah diadakannya penyuluhan dan honor untuk tenaga PSKS sehingga meningkatkan kinerja pendampingan sosial klien.
3. Untuk mengoptimalkan kerjasama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung, selalu ditingkatkan kolaborasi dengan dunia usaha/swasta.
4. Senantiasa selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Kabupaten/Kota dalam penanganan (PPKS) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian Pencapaian Kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja dan dari hasil Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 Triwulan II dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata – Rata tingkat capaian kinerja pada keseluruhan program Tahun 2024 Triwulan II sebesar **26,86%**
2. Rata – Rata tingkat capaian keuangan Tahun 2024 Triwulan II sebesar **40,59%.**

Namun demikian capaian tersebut tetap sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan masalah sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Pemberdayaan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.

Dan juga sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial;
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial;
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi;

4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat;
6. Memperluas jaringan dan meningkatkan kinerja pelayanan;
7. Peningkatan kapasitas PSKS dan peningkatan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, serta kesetiakawanan sosial melalui edukasi kesejahteraan sosial.

5.2 Rekomendasi

Dari beberapa kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Hasil Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Lampung dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yang ada secara lebih maksimal dan pemanfaatan anggaran dengan lebih cermat;
2. Memaksimalkan sumberdaya aparatur yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, mengingat hampir di seluruh Perangkat Daerah dalam kondisi kekurangan tenaga staf;
3. Penyusunan alur kas/anggaran kas diharapkan lebih cermat lagi sehingga kegiatan akan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan tanpa ada kendala dalam pencairan dana;
4. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan khususnya bagi personil baru yang menangani bidang sosial sehingga tidak akan ditemui kendala administrasi.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

(Tabel T-C 29 Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	KODE				KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)	
	1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	1	6				DINAS SOSIAL																		
	1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	121.398.507.854	100	23.591.171.605	100	22.949.477.672	29%	9.672.639.611	29%	42,15%	100	33.263.811.216	100,29%	27,40%		Dinas Sosial Provinsi Lampung
	1	6	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersedia	%	100	659.806.700	100	127.445.250	100	150.000.000	33,07%	36.000.000	33,07%	24,00%	100	163.445.250	100,33%	24,77%		
	1	6	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	234.209.700	5	28.185.150	5	28.185.150	1	3.000.000	20,00%	10,64%	6	31.185.150	24,00%	13,32%		
	1	6	1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	55	208.702.700	11	48.095.100	11	70.649.850	4	19.500.000	36,36%	27,60%	15	67.595.100	27,27%	32,39%		
	1	6	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	35	216.894.300	7	51.165.000	7	51.165.000	3	13.500.000	42,86%	26,39%	10	64.665.000	28,57%	29,81%		
	1	6	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembiayaan administrasi keuangan	%	100	102.792.838.046	100	17.572.929.344	100	19.143.968.025	41,67%	8.183.832.822	41,67%	42,75%	100	25.756.762.166	100,42%	25,06%		
	1	6	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	785	98.889.932.170	157	17.252.929.344	157	18.322.968.025	157	7.707.991.722	100,00%	42,07%	314	24.960.921.066	40,00%	25,24%		
	1	6	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	3.744.000.000	1	275.000.000	1	775.000.000	0	458.140.000	0,00%	59,11%	1	733.140.000	25,00%	19,58%		
	1	6	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	57.708.822	1	24.450.000	1	10.300.000	0	0	0,00%	0,00%	1	24.450.000	25,00%	42,37%		
	1	6	1	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	21.229.411	1	5.100.000	1	5.100.000	1	4.750.000	100,00%	93,14%	2	9.850.000	50,00%	46,40%		
	1	6	1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	48	58.688.232	12	10.300.000	12	25.450.000	6	9.490.000	50,00%	37,29%	18	19.790.000	37,50%	33,72%		
	1	6	1	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	21.279.411	1	5.150.000	1	5.150.000	0	3.461.100	0,00%	67,21%	1	8.611.100	25,00%	40,47%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		
	1	6	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Barang Milik Pemerintah	%	100	92.347.058	100	48.560.000	100	20.000.000	33,33%	15.393.700	33,33%	76,97%	100	63.953.700	100,33%	69,25%		
	1	6	1	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	19.951.764	1	15.000.000	1	5.000.000	0	3.385.200	0,00%	67,70%	1	18.385.200	20,00%	92,15%		
	1	6	1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	22.395.294	2	16.560.000	2	5.000.000	1	4.875.800	50,00%	97,52%	3	21.435.800	30,00%	95,72%		
	1	6	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	50.000.000	2	17.000.000	2	10.000.000	1	7.132.700	50,00%	71,33%	3	24.132.700	50,00%	48,27%		
	1	6	1	05		Administrasi Kepegawaiaan Daerah	Persentase Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ASN	%	100	92.300.000	100	77.499.600	100	58.000.000	8,33%	9.300.000	8,33%	16,03%	100	86.799.600	100,08%	94,04%		
	1	6	1	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	48	60.000.000	12	25.900.000	12	28.000.000	2	9.300.000	16,67%	33,21%	14	35.200.000	29,17%	58,67%		
	1	6	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	32.300.000	24	51.599.600	30	30.000.000	0	0	0,00%	0,00%	24	51.599.600	20,00%	159,75%		
	1	6	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia	%	100	8.248.180.720	100	2.346.238.590	100	1.144.450.482	25,00%	492.123.499	25,00%	43,00%	100	2.838.362.089	100,25%	34,41%		
	1	6	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	500	171.073.475	1	59.910.000	1	30.000.000	0	15.000.000	0,00%	50,00%	1	74.910.000	0,20%	43,79%		
	1	6	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.830.160.150	1	535.740.600	1	126.382.000	0	16.080.000	0,00%	12,72%	1	551.820.600	20,00%	30,15%		
	1	6	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1.463.685.061	1	291.957.530	1	28.669.000	0	4.000.000	0,00%	13,95%	1	295.957.530	20,00%	20,22%		
	1	6	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	170.235.266	1	41.200.000	1	30.000.000	0	17.350.000	0,00%	57,83%	1	58.550.000	20,00%	34,39%		
	1	6	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	205.164.697	1	119.585.482	1	91.025.482	0	40.800.000	0,00%	44,82%	1	160.385.482	20,00%	78,17%		
	1	6	1	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	695.822.494	1	147.961.000	1	75.000.000	1	72.940.000	100,00%	97,25%	2	220.901.000	40,00%	31,75%		
	1	6	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	189.035.286	12	44.910.000	12	45.000.000	6	16.095.000	50,00%	35,77%	18	61.005.000	30,00%	32,27%		
	1	6	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	3.523.004.291	12	1.104.973.978	12	718.374.000	6	309.858.499	50,00%	43,13%	18	1.414.832.477	30,00%	40,16%		
	1	6	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa urusan Pemerintah daerah	%	100	6.981.109.537	100	1.731.146.156	100	1.804.684.631	50,00%	786.196.940	50,00%	43,56%	101	2.517.343.096	100,50%	36,06%		
	1	6	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	16.116.500	12	5.112.000	12	5.112.000	6	1.824.000	50,00%	35,68%	18	6.936.000	30,00%	43,04%		
	1	6	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1.893.853.875	12	420.804.156	12	440.192.731	6	170.356.265	50,00%	38,70%	18	591.160.421	30,00%	31,21%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)			
	1	6	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	166.683.070	12	45.000.000	12	50.000.000	6	24.755.000	50,00%	49,51%	18	69.755.000	37,50%	41,85%		
	1	6	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.904.456.092	12	1.260.230.000	12	1.309.379.900	6	589.261.675	50,00%	45,00%	18	1.849.491.675	30,00%	37,71%		
	1	6	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Bangunan dan kendaraan yang terpelihara	%	100	2.531.925.793	100	1.687.352.665	100	628.374.534	11,07%	149.792.650	11,07%	23,84%	100	1.837.145.315	100,11%	72,56%		
	1	6	1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	79	573.437.643	14	540.848.665	14	507.710.000	2	143.042.650	14,29%	28,17%	16	683.891.315	20,25%	119,26%		
	1	6	1	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	200	80.000.000	40	19.500.000	50	19.500.000	15	6.750.000	30,00%	34,62%	55	26.250.000	27,50%	32,81%		
	1	6	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	1.458.488.150	1	538.876.000	8	70.000.000	0	0	0,00%	0,00%	1	538.876.000	5,26%	36,95%		
	1	6	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	420.000.000	5	588.128.000	5	31.164.534	0	0	0,00%	0,00%	5	588.128.000	20,00%	140,03%		
	1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kesejahteraan sosial	%	100	2.583.716.900	100	525.845.850	100	351.896.850	44%	113.554.600	44%	32,27%	100	639.400.450	100,44%	24,75%		
	1	6	2	01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin	%	100	275.000.000	100	81.828.000	100	40.000.000	37,50%	8.336.000	37,50%	20,84%	100	90.164.000	100,38%	32,79%		
	1	6	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	26	275.000.000	8	81.828.000	8	40.000.000	3	8.336.000	37,50%	20,84%	11	90.164.000	42,31%	32,79%		
	1	6	2	02		Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	%	100	2.308.716.900	100	444.017.850	100	311.896.850	50,00%	105.218.600	50,00%	33,74%	101	549.236.450	100,50%	23,79%		
	1	6	2	02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	240	353.282.800	80	71.391.450	60	71.391.450	0	0	0,00%	0,00%	80	71.391.450	33,33%	20,21%		
	1	6	2	02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	914	666.142.000	229	70.639.400	229	70.639.400	229	35.489.400	100,00%	50,24%	458	106.128.800	50,11%	15,93%		
	1	6	2	02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	140	169.409.000	40	69.866.000	40	69.866.000	0	0	0,00%	0,00%	40	69.866.000	28,57%	41,24%		
	1	6	2	02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	10	1.119.883.100	2	232.121.000	30	100.000.000	30	69.729.200	100,00%	69,73%	32	301.850.200	320,00%	26,95%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung gjawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)
	1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	%	100	1.000.200.000	100	215.575.280	100	249.999.500	53%	150.394.000	53%	60,16%	101	365.969.280	100,53%	36,59%		
	1	6	3	01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang di pulangkan ke daerah asal	%	100	1.000.200.000	100	215.575.280	100	249.999.500	53,33%	150.394.000	53,33%	60,16%	101	365.969.280	100,53%	36,59%		
	1	6	2	01	0001	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	1.000.200.000	15	215.575.280	15	249.999.500	8	150.394.000	53,33%	60,16%	23	365.969.280	23,00%	36,59%		
	1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang dilayani dan Direhabilitasi	%	100	42.745.076.359	100	13.258.987.560	100	7.837.448.908	54%	2.513.366.237	54%	32,07%	101	15.772.353.797	100,54%	36,90%		
	1	6	4	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	%	100	5.906.282.597	100	1.332.598.699	100	1.104.562.599	68,18%	345.034.246	68,18%	31,24%	101	1.677.632.945	100,68%	28,40%		
	1	6	4	01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	2.458.053.801	50	573.259.200	50	573.637.500	50	190.145.146	100,00%	33,15%	100	763.404.346	40,00%	31,06%		
	1	6	4	01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	484.149.652	50	88.706.000	50	89.906.700	50	24.215.000	100,00%	26,93%	100	112.921.000	40,00%	23,32%		
	1	6	4	01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	250	650.699.208	50	241.165.100	50	10.000.000	50	4.322.500	100,00%	43,23%	100	245.487.600	40,00%	37,73%		
	1	6	4	01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	149.000.000	20	66.000.000	50	66.000.000	50	22.376.000	100,00%	33,90%	70	88.376.000	70,00%	59,31%		
	1	6	4	01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	250	470.628.784	50	52.359.000	50	53.109.000	50	13.138.000	100,00%	24,74%	100	65.497.000	40,00%	13,92%		
	1	6	4	01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	250	1.431.286.152	50	236.319.399	50	236.319.399	50	81.513.600	100,00%	34,49%	100	317.832.999	40,00%	22,21%		
	1	6	4	01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	100.000.000	50	49.200.000	50	50.000.000	0	0	0,00%	0,00%	50	49.200.000	50,00%	49,20%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)		(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)
	1	6	4	01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	4.500.000	50	1.000.000	25	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%	50	1.000.000	100,00%	22,22%		
	1	6	4	01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	250	37.965.000	50	14.850.000	50	14.850.000	25	4.424.000	50,00%	29,79%	75	19.274.000	30,00%	50,77%		
	1	6	4	01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	100.000.000	50	4.740.000	50	4.740.000	0	0	0,00%	0,00%	50	4.740.000	50,00%	4,74%		
	1	6	4	01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	20.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	4.900.000	100,00%	98,00%	100	9.900.000	100,00%	49,50%		
	1	6	4	02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Anak terlantar di dalam Panti	%	100	18.136.163.848	100	4.031.589.837	100	3.640.016.644	67,49%	1.000.892.708	67,49%	27,50%	101	5.032.482.545	100,67%	27,75%		
	1	6	4	02	0001	Pengasuhan		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	825	1.795.081.389	165	354.168.000	165	356.238.050	165	110.860.000	100,00%	31,12%	330	465.028.000	40,00%	25,91%		
	1	6	4	02	0002	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	825	7.086.763.399	165	1.529.731.190	165	1.590.405.000	165	497.285.008	100,00%	31,27%	330	2.027.016.198	40,00%	28,60%		
	1	6	4	02	0003	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	825	1.533.368.032	165	294.774.700	165	282.418.700	165	44.226.400	100,00%	15,66%	330	339.001.100	40,00%	22,11%		
	1	6	4	02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	825	1.759.254.434	165	614.321.847	165	120.000.000	165	3.844.000	100,00%	3,20%	330	618.165.847	40,00%	35,14%		
	1	6	4	02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	825	576.372.413	165	48.245.200	165	50.917.103	165	17.106.000	100,00%	33,60%	330	65.351.200	40,00%	11,34%		
	1	6	4	02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	825	1.566.344.983	165	375.548.800	165	372.027.829	165	97.121.300	100,00%	26,11%	330	472.670.100	40,00%	30,18%		
	1	6	4	02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	825	1.045.741.898	165	177.461.300	165	180.565.220	165	58.461.000	100,00%	32,38%	330	235.922.300	40,00%	22,56%		
	1	6	4	02	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	200	18.000.000	100	5.500.000	100	7.500.000	0	0	0,00%	0,00%	100	5.500.000	50,00%	30,56%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)
	1	6	4	02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	825	1.998.347.650	165	570.546.000	165	613.851.800	70	171.989.000	42,42%	28,02%	235	742.535.000	28,48%	37,16%		
	1	6	4	02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	825	653.289.650	165	49.132.800	165	53.932.800	0	0	0,00%	0,00%	165	49.132.800	20,00%	7,52%		
	1	6	4	02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	20	103.600.000	165	12.160.000	165	12.160.142	0	0	0,00%	0,00%	165	12.160.000	825,00%	11,74%		
	1	6	4	03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	%	100	6.951.036.776	100	1.568.499.654	100	1.357.732.279	25,00%	423.846.834	25,00%	31,22%	100	1.992.346.488	100,25%	28,66%		
	1	6	4	03	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	425	3.971.536.418	85	897.702.375	85	975.602.000	85	303.213.834	100,00%	31,08%	170	1.200.916.209	40,00%	30,24%		
	1	6	4	03	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	425	423.032.965	85	65.528.779	85	65.612.279	85	43.440.000	100,00%	66,21%	170	108.968.779	40,00%	25,76%		
	1	6	4	03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	425	485.897.054	85	299.390.500	85	10.000.000	85	1.000.000	100,00%	10,00%	170	300.390.500	40,00%	61,82%		
	1	6	4	03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	425	213.492.998	85	14.250.000	85	14.250.000	0	0	0,00%	0,00%	85	14.250.000	20,00%	6,67%		
	1	6	4	03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	425	359.094.815	85	35.153.700	85	35.153.700	85	8.150.000	100,00%	23,18%	170	43.303.700	40,00%	12,06%		
	1	6	4	03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	425	897.383.708	85	169.934.300	85	169.934.300	85	55.275.000	100,00%	32,53%	170	225.209.300	40,00%	25,10%		
	1	6	4	03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	170	50.000.000	85	12.960.000	85	12.960.000	85	4.318.000	100,00%	33,32%	170	17.278.000	100,00%	34,56%		
	1	6	4	03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	170	5.000.000	25	2.500.000	25	2.500.000	0	0	0,00%	0,00%	25	2.500.000	14,71%	50,00%		
	1	6	4	03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	425	197.831.175	85	7.100.000	85	7.100.000	22	2.050.000	25,88%	28,87%	107	9.150.000	25,18%	4,63%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)		(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)
	1	6	4	03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	50.000.000	85	21.826.000	85	22.084.000	0	0	0,00%	0,00%	85	21.826.000	50,00%	43,65%		
	1	6	4	03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	50.000.000	85	21.702.000	85	22.084.000	0	0	0,00%	0,00%	85	21.702.000	50,00%	43,40%		
	1	6	4	03	0012	Pemulasaraan		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	125	247.767.643	25	20.452.000	10	20.452.000	6	6.400.000	60,00%	31,29%	31	26.852.000	24,80%	10,84%		
	1	6	4	04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		Persentase Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	%	100	3.335.524.635	100	644.901.376	100	537.572.726	79,60%	214.356.250	79,60%	39,87%	101	859.257.626	100,80%	25,76%		
	1	6	4	04	0001	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	125	1.179.085.241	25	273.262.750	25	273.750.000	25	90.233.250	100,00%	32,96%	50	363.496.000	40,00%	30,83%		
	1	6	4	03	0002	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	125	185.294.765	25	19.302.500	25	19.302.500	25	15.125.000	100,00%	78,36%	50	34.427.500	40,00%	18,58%		
	1	6	4	03	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	125	316.698.736	25	119.950.900	25	10.000.000	25	10.000.000	100,00%	100,00%	50	129.950.900	40,00%	41,03%		
	1	6	4	03	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	125	102.876.284	25	6.304.429	25	6.304.429	25	3.300.000	100,00%	52,34%	50	9.604.429	40,00%	9,34%		
	1	6	4	03	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	125	312.984.461	25	51.570.000	25	51.570.000	25	17.136.000	100,00%	33,23%	50	68.706.000	40,00%	21,95%		
	1	6	4	03	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	125	626.212.407	25	122.911.597	25	122.911.597	25	51.520.000	100,00%	41,92%	50	174.431.597	40,00%	27,86%		
	1	6	4	03	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	125	213.358.983	25	24.611.200	25	24.611.200	25	16.159.000	100,00%	65,66%	50	40.770.200	40,00%	19,11%		
	1	6	4	03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	50	10.000.000	20	2.000.000	25	2.000.000	0	0	0,00%	0,00%	20	2.000.000	40,00%	20,00%		
	1	6	4	03	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	125	104.541.999	25	7.200.000	25	7.225.000	14	2.376.000	56,00%	32,89%	39	9.576.000	31,20%	9,16%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)
	1	6	4	03	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	125	167.711.759	25	7.680.000	25	9.790.000	10	5.307.000	40,00%	54,21%	35	12.987.000	28,00%	7,74%		
	1	6	4	03	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	5	116.760.000	1	10.108.000	1	10.108.000	0	3.200.000	0,00%	31,66%	1	13.308.000	20,00%	11,40%		
	1	6	4	05		Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Persentase Layanan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	8.416.068.503	100	5.681.397.994	100	1.197.564.660	29,17%	529.236.200	29,17%	44,19%	100	6.210.634.194	100,29%	73,79%		
	1	6	4	05	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.411.400.000	80	655.568.000	80	471.626.000	30	119.943.300	37,50%	25,43%	110	775.511.300	27,50%	54,95%		
	1	6	4	05	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	400	720.750.000	80	104.550.000	80	1.000.000	0	0	0,00%	0,00%	80	104.550.000	20,00%	14,51%		
	1	6	4	05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.620.549.954	80	2.549.128.424	80	150.000.000	40	60.276.000	50,00%	40,18%	120	2.609.404.424	30,00%	161,02%		
	1	6	4	05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	400	3.553.199.456	80	2.266.193.970	80	510.274.200	10	328.620.800	12,50%	64,40%	90	2.594.814.770	22,50%	73,03%		
	1	6	4	05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan provinsi	Orang	400	802.393.093	80	76.958.000	80	61.680.800	20	18.845.000	25,00%	30,55%	100	95.803.000	25,00%	11,94%		
	1	6	4	05	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	400	307.776.000	80	28.999.600	80	2.983.660	40	1.551.100	50,00%	51,99%	120	30.550.700	30,00%	9,93%		
	1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	1.883.591.500	100	3.790.281.165	100	1.053.153.000	33%	735.031.000	33%	69,79%	100	4.525.312.165	100,33%	240,25%		
	1	6	5	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	%	100	1.883.591.500	100	3.790.281.165	100	1.053.153.000	33,33%	735.031.000	33,33%	69,79%	100	4.525.312.165	100,33%	240,25%		
	1	6	5	02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	3500	407.821.300	700	714.883.665	700	150.000.000	0	0	0,00%	0,00%	700	714.883.665	20,00%	175,29%		
	1	6	5	02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3500	1.207.845.250	700	95.060.000	700	103.153.000	0	0	0,00%	0,00%	700	95.060.000	20,00%	7,87%		
	1	6	5	02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	3500	267.924.950	700	2.980.337.500	700	800.000.000	700	735.031.000	100,00%	91,88%	1400	3.715.368.500	40,00%	1386,72%		

NO	KODE					KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d Tahun 2023		Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d Triwulan I Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2024		Tingkat Capaian Renstra s.d Tahun 2023 (%)		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggun gjawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		(13)	(14)
	1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	3.732.164.008	100	2.578.958.168	100	1.267.505.677	49%	508.581.600	49%	40,12%	100	3.087.539.768	100,49%	82,73%		
	1	6	6	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	%	100	3.732.164.008	100	2.578.958.168	100	1.267.505.677	49,00%	508.581.600	49,00%	40,12%	100	3.087.539.768	100,49%	82,73%		
	1	6	6	01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	2500	201.997.951	500	190.033.879	500	23.140.320	200	7.625.000	40,00%	32,95%	700	197.658.879	28,00%	97,85%		
	1	6	6	01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	2000	378.391.130	500	19.012.000	500	19.012.000	500	19.012.000	100,00%	100,00%	1000	38.024.000	50,00%	10,05%		
	1	6	6	01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	unit	10	949.261.919	2	228.000.000	2	534.640.000	0	52.800.000	0,00%	9,88%	2	280.800.000	20,00%	29,58%		
	1	6	6	01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangn Provinsi	Orang	2000	683.603.130	500	1.890.034.932	500	487.526.800	400	376.977.200	80,00%	77,32%	900	2.267.012.132	45,00%	331,63%		
	1	6	6	01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangn Provinsi	Orang	2500	1.518.909.878	500	251.877.357	500	203.186.557	125	52.167.400	25,00%	25,67%	625	304.044.757	25,00%	20,02%		
	1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	%	100	938.358.500	100	925.185.423	100	294.171.000	25%	108.666.000	25%	36,94%	100	1.033.851.423	100,25%	110,18%		
	1	6	7	01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	938.358.500	100	925.185.423	100	294.171.000	25,00%	108.666.000	25,00%	36,94%	100	1.033.851.423	100,25%	110,18%		
	1	6	7	01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	10	469.179.250	2	643.770.000	2	44.171.000	0	0	0,00%	0,00%	2	643.770.000	20,00%	137,21%		
	1	6	7	01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang	10	469.179.250	2	281.415.423	2	250.000.000	1	108.666.000	50,00%	43,47%	3	390.081.423	30,00%	83,14%		
TOTAL									100	174.281.615.121	100	44.886.005.051	100	34.003.652.607	27%	13.802.233.048	26,86%	40,59%	100,27	58.688.238.099	100,27%			

**TABEL KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA RENJA TERHADAP APBD
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD	APBD	KET
1	2	3	4	5
1,06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
1.06.01.1.01	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	v	v	Sesuai
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	v	v	Sesuai
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	v	v	Sesuai
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	v	v	Sesuai
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	v	v	Sesuai
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.06.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.03.03	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Perangkat Daerah SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah	v	v	Sesuai
1.06.01.1.04	Administrasi Kepegawaiaan Daerah			
1.06.01.1.04.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	v	v	Sesuai
1.06.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	v	v	Sesuai
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	v	v	Sesuai
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	v	v	Sesuai
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v	v	Sesuai
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	v	v	Sesuai
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	v	v	Sesuai

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD	APBD	KET
1	2	3	4	5
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.06.01.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	v	v	Sesuai
1.06.01.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	v	v	Sesuai
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	Sesuai
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	Sesuai
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang	v	v	Sesuai
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi			
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	v	v	Sesuai
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	v	v	Sesuai
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	v	v	Sesuai
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negeran Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal			
1.06.03.1.01.01	Fasilitas Pemulangan Warga Negeran Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	v	v	Sesuai
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1.06.04.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti			
1.06.04.01.01	Penyediaan Permakanan	v	v	Sesuai
1.06.04.01.02	Penyediaan Sandang	v	v	Sesuai
1.06.04.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	v	v	Sesuai
1.06.04.01.04	Penyediaan Alat Bantu	v	v	Sesuai
1.06.04.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	v	v	Sesuai
1.06.04.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	v	v	Sesuai
1.06.04.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	v	v	Sesuai
1.06.04.01.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	v	v	Sesuai
1.06.04.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	v	v	Sesuai
1.06.04.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.04.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.04.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
1.06.04.02.01	Pengasuhan	v	v	Sesuai
1.06.04.02.02	Penyediaan Makanan	v	v	Sesuai
1.06.04.02.13	Penyediaan Sandang	v	v	Sesuai
1.06.04.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	v	v	Sesuai
1.06.04.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	v	v	Sesuai

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD	APBD	KET
1	2	3	4	5
1.06.04.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	v	v	Sesuai
1.06.04.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	v	v	Sesuai
1.06.04.02.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	v	v	Sesuai
1.06.04.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	v	v	Sesuai
1.06.04.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.04.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.04.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti			
1.06.04.03.01	Penyediaan Permakanan	v	v	Sesuai
1.06.04.03.02	Penyediaan Sandang	v	v	Sesuai
1.06.04.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	v	v	Sesuai
1.06.04.03.04	Penyediaan Alat bantu	v	v	Sesuai
1.06.04.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	v	v	Sesuai
1.06.04.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	v	v	Sesuai
1.06.04.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	v	v	Sesuai
1.06.04.03.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	v	v	Sesuai
1.06.04.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	v	v	Sesuai
1.06.04.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.04.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.04.03.12	Pemulasaran	v	v	Sesuai
1.06.04.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			
1.06.04.04.01	Penyediaan Permakanan	v	v	Sesuai
1.06.04.04.02	Penyediaan Sandang	v	v	Sesuai
1.06.04.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	v	v	Sesuai
1.06.04.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	v	v	Sesuai
1.06.04.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	v	v	Sesuai
1.06.04.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	v	v	Sesuai
1.06.04.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	v	v	Sesuai
1.06.04.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	v	v	Sesuai
1.06.04.04.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	v	v	Sesuai
1.06.04.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	v	v	Sesuai
1.06.04.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	v	v	Sesuai
1.06.04.05	Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti			
1.06.04.05.01	Penyediaan Permakanan	v	v	Sesuai
1.06.04.05.02	Penyediaan Sandang	v	v	Sesuai
1.06.04.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	v	v	Sesuai
1.06.04.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	v	v	Sesuai
1.06.04.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	v	v	Sesuai
1.06.04.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	v	v	Sesuai
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	v	v	Sesuai
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	v	v	Sesuai
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	v	v	Sesuai

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD	APBD	KET
1	2	3	4	5
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1.06.06.1,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
1.06.06.1,01.01	Penyediaan Permakanan	v	v	Sesuai
1.06.06.1,01.02	Penyediaan Sandang	v	v	Sesuai
1.06.06.1,01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	v	v	Sesuai
1.06.06.1,01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	v	v	Sesuai
1.06.06.1,01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	v	v	Sesuai
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN			
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	v	v	Sesuai
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	v	v	Sesuai